

PENDAHULUAN

Perkembangan administrasi publik dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan transformasi yang signifikan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang responsif, efektif, dan efisien (Sutikno et al., 2017). Model birokrasi tradisional (*Old Public Administration*) yang berorientasi pada prosedur dan hierarki dinilai tidak lagi memadai, sehingga mendorong lahirnya berbagai gagasan reformasi administrasi publik di berbagai negara. Salah satu paradigma yang berpengaruh kuat adalah *New Public Management* (NPM), yang mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta seperti efisiensi, efektivitas, orientasi pelanggan, dan pengukuran kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan (Zaenuri, 2012). NPM menekankan capaian hasil (*outcome*) sebagai indikator keberhasilan utama, sekaligus menuntut pengelolaan sumber daya publik yang profesional, akuntabel, dan transparan (Sutikno, 2022).

Reformasi tersebut diperkuat melalui *pendekatan Reinventing Government* yang diperkenalkan oleh Osborne dan Gaebler (1992), yang menekankan perlunya birokrasi yang fleksibel, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat (Schneider, 1995). Pemerintah didorong untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menciptakan nilai dan daya saing dalam pelayanan publik. Sejalan dengan itu, NPM memperkenalkan logika bisnis modern ke sektor publik, termasuk persaingan dan inovasi pelayanan. (Bastian, 2006) menjelaskan bahwa paradigma ini mengurangi dominasi monopolipemerintah dengan membuka ruang kerja sama dan kompetisi bersama sektor swasta dan masyarakat. Mekanisme tersebut memungkinkan penerapan prinsip efisiensi dan penciptaan nilai dalam penyediaan layanan publik (Sutikno, Atika, et al., 2022b).

Transformasi paradigma administrasi publik turut berdampak hingga ke tingkat pemerintahan desa. Desa sebagai unit pemerintahan

memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan BUMDes juga sangat bergantung pada penerapan manajemen yang tepat, karena tanpa pengelolaan yang baik, aset desa berpotensi tidak berkembang dan PADes tidak meningkat. Dengan manajemen yang efektif, BUMDes dapat menjadi model inspiratif dalam memperkuat PADes sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ddalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Pada BUMDes Cipta Karya Unggul, Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.**

METODE

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode utama. Seperti yang dijelaskan oleh (Moleong & Surjaman, 2014), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari hasil observasi terhadap perilaku individu dalam konteks tertentu. Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Cipta Karya Unggul" di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung mengenai pengelolaan dan manajemen BUMDes dengan pihak-pihak terkait, yaitu Kepala Desa Tipar Kidul, Ketua Pengawas BUMDes Cipta Karya Unggul, Direktur Utama BUMDes Cipta Karya Unggul, Sekretaris BUMDes Cipta Karya Unggul, Bendahara BUMDes Cipta Karya Unggul, serta 3 Karyawan (Pengelola Unit Usaha) BUMDes Cipta Karya Unggul. Wawancara